

Pendampingan Akuntansi Dan Legalitas Usaha Bagi UMKM Desa Pajajar Sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Mohamad Djadjuli¹, Surono², Rini Indriyani³, Fitriya Sari⁴, Lina Lita Sahara⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia

Email: mohammad.djadjuli@umc.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 16, 2025

Revised November 19, 2025

Accepted November 19, 2025

Kata Kunci:

Pendampingan Akuntansi, Legalitas
Usaha UMKM, Kepercayaan
Konsumen.

Keywords:

Accounting Assistance, MSME
Business Legality, Consumer Trust



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Mohamad Djadjuli, et al,
Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis
Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan legalitas dan kepercayaan konsumen melalui pendampingan akuntansi serta fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di Desa Jamblang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, pembagian modul prosedural, dan pendampingan langsung dalam sistem Online Single Submission (OSS). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penerapan modul prosedural efektif membantu pelaku UMKM memahami tahapan administrasi legalitas usaha dan mempercepat proses penerbitan NIB. Setelah pendampingan, terjadi peningkatan signifikan jumlah UMKM yang memiliki NIB dari 15% menjadi 78%. Selain memberikan kepastian hukum, legalitas usaha juga berdampak positif terhadap kredibilitas dan kepercayaan konsumen. Dengan demikian, pendampingan berbasis OSS yang disertai modul akuntansi dan legalitas terbukti menjadi strategi efektif dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha UMKM di era digital.

ABSTRACT

This activity aims to enhance business legality and consumer trust through accounting assistance and the facilitation of Business Identification Number (NIB) issuance for MSMEs in Jamblang Village. The method employed is descriptive qualitative with a participatory approach, involving socialization, distribution of procedural modules, and direct assistance in the Online Single Submission (OSS) system. The results show that the implementation of procedural modules effectively helps MSME actors understand the administrative stages of business legality and accelerates the NIB issuance process. After the mentoring activities, the number of MSMEs possessing an NIB increased significantly from 15% to 78%. In addition to providing legal certainty, business legality also has a positive impact on business credibility and consumer trust. Thus, OSS-based assistance supported by accounting and legality modules proves to be an effective strategy for strengthening MSME competitiveness and business sustainability in the digital era.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM berkontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% total tenaga kerja nasional. Namun demikian, di tingkat pedesaan seperti Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi kendala mendasar, terutama dalam aspek legalitas usaha dan pencatatan akuntansi. Permasalahan legalitas menjadi isu utama karena sebagian besar pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar, maupun sertifikasi halal. Ketiadaan dokumen legal tersebut menyebabkan terbatasnya akses pelaku usaha terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, serta peluang kemitraan dengan pihak lain (Sari & Hidayat, 2022). Selain itu, usaha yang belum memiliki legalitas cenderung dianggap kurang kredibel dan profesional oleh konsumen, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan dan daya saing di pasar yang semakin kompetitif (Wibowo, 2023).

Pemerintah telah berupaya menyederhanakan proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang memungkinkan pelaku usaha mendaftarkan dan memperoleh NIB secara digital. Namun, masih rendahnya literasi digital dan keterbatasan pemahaman administratif menjadi hambatan utama bagi sebagian besar pelaku UMKM dalam memanfaatkan sistem tersebut (World Bank, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan OSS tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada pendampingan langsung dan edukasi berkelanjutan bagi pelaku usaha di tingkat lokal. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai mitra masyarakat dalam memperkuat kapasitas UMKM melalui program pengabdian, pelatihan, dan pendampingan berbasis komunitas. Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika dapat berfungsi sebagai *agent of change* yang menjembatani kesenjangan literasi hukum, digital, dan akuntansi antara kebijakan pemerintah dan kondisi lapangan (Putri & Nurfadilah, 2023). Melalui kegiatan pendampingan akuntansi dan fasilitasi legalitas, pelaku UMKM dapat memahami pentingnya pencatatan keuangan, penyusunan laporan sederhana, serta memperoleh legalitas usaha yang sah secara hukum.

Selain memperkuat aspek administratif, kegiatan pendampingan ini juga berimplikasi terhadap peningkatan kepercayaan konsumen. UMKM yang memiliki dokumen legal seperti NIB dan laporan keuangan yang akuntabel akan lebih mudah memperoleh kepercayaan masyarakat dan mitra bisnis, serta berpotensi memperluas pasar. Menurut penelitian Hapsari (2024), persepsi kepercayaan konsumen meningkat signifikan terhadap UMKM yang memiliki legalitas formal dan melakukan praktik pencatatan keuangan secara transparan.

Berdasarkan fenomena tersebut, kegiatan pendampingan akuntansi dan legalitas usaha bagi UMKM Desa Pajajar menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi UMKM menuju entitas usaha yang legal, kredibel, dan berdaya saing tinggi. Melalui sinergi antara akademisi, pemerintah desa, dan pelaku UMKM, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam pengelolaan keuangan, memperoleh NIB secara mandiri, serta memperkuat kepercayaan konsumen melalui transparansi dan profesionalitas usaha. Dengan demikian, program ini dapat menjadi model keberlanjutan dalam penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan berbasis akuntabilitas dan legalitas.

Metode

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui metode action research (penelitian tindakan), di mana tim pelaksana berperan aktif mendampingi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memahami, mengurus, dan menerapkan praktik legalitas serta pencatatan keuangan sederhana. Pendekatan ini dipilih agar kegiatan tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada peserta untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh secara praktis.

Tahap Persiapan

Tahap awal kegiatan diawali dengan observasi lapangan di Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, untuk memetakan kondisi UMKM setempat, terutama yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan belum menerapkan sistem pencatatan keuangan. Tim kemudian berkoordinasi dengan perangkat desa serta kelompok pelaku usaha lokal untuk menentukan peserta yang akan mengikuti program pendampingan. Selain itu, dilakukan penyusunan modul pelatihan akuntansi dasar dan panduan pengurusan legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang disesuaikan dengan tingkat literasi peserta.

Tahap Pelaksanaan

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan pendampingan yang terdiri atas dua kegiatan utama, yaitu pelatihan legalitas usaha dan pelatihan akuntansi dasar.

Pelatihan dan Pendampingan Legalitas Usaha

Pada tahap ini, peserta diberikan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha, seperti manfaat kepemilikan NIB, izin usaha, dan sertifikasi halal dalam meningkatkan kredibilitas serta peluang akses pembiayaan. Tim kemudian membimbing peserta dalam proses pembuatan akun OSS dan penerbitan NIB, dengan panduan langsung menggunakan perangkat digital yang disediakan. Mahasiswa bertindak sebagai fasilitator dalam membantu pengisian data dan memastikan setiap UMKM berhasil memperoleh dokumen legalitas usahanya.

Pelatihan Pencatatan Akuntansi Sederhana

Selanjutnya, peserta dilatih untuk memahami pencatatan transaksi keuangan harian menggunakan buku kas sederhana. Pelatihan mencakup pemisahan antara uang pribadi dan uang usaha, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, serta penyusunan laporan laba-rugi sederhana. Selain itu, diperkenalkan pula penggunaan aplikasi digital kas sederhana sebagai alternatif bagi pelaku usaha yang memiliki akses terhadap smartphone.

Kegiatan ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikkan langsung penerapan akuntansi dasar dan pengurusan legalitas usaha dengan bimbingan mahasiswa pendamping.

Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan dan dampaknya terhadap perubahan perilaku peserta. Penilaian dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kegiatan, seperti hasil penerbitan NIB, catatan keuangan yang dibuat, serta tanggapan pelaku UMKM setelah mengikuti program. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya legalitas usaha dan praktik

akuntansi sederhana. Sebagian besar peserta merasa lebih percaya diri dalam menjalankan usahanya karena telah memiliki dokumen resmi dan sistem pencatatan yang lebih tertata.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari kegiatan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan dokumentasi kegiatan. Hasil akhir menunjukkan bahwa pendampingan akuntansi dan legalitas usaha berkontribusi terhadap peningkatan profesionalitas dan kepercayaan konsumen terhadap UMKM Desa Pajajar Kabupaten Majalengka, karena pelaku usaha mampu menunjukkan legalitas yang sah dan laporan keuangan yang lebih transparan..

Hasil dan Pembahasan

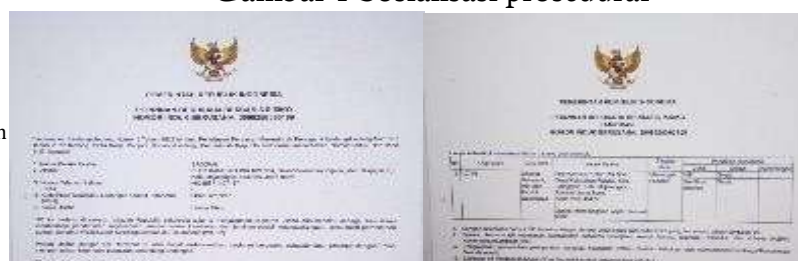
Kegiatan pendampingan akuntansi dan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap pemahaman dan penerapan aspek legalitas serta pencatatan keuangan sederhana. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan belum menerapkan sistem pencatatan keuangan yang teratur. Setelah pendampingan dilakukan, para pelaku UMKM mulai memahami manfaat kepemilikan legalitas usaha serta pentingnya pencatatan transaksi keuangan yang akuntabel.

1. Peningkatan Kesadaran dan Akses Legalitas Usaha

Temuan kegiatan menunjukkan bahwa fasilitasi Online Single Submission (OSS) melalui bimbingan teknis langsung memudahkan pelaku UMKM dalam mengurus NIB. Sebelumnya, mereka merasa kesulitan karena keterbatasan akses internet dan kurangnya pemahaman teknis. Setelah diberikan modul prosedural yang disusun secara sederhana dan aplikatif, para pelaku usaha mampu mengikuti tahapan pendaftaran secara mandiri. Hasil ini menguatkan pentingnya fasilitasi OSS dalam meningkatkan efektivitas penerbitan NIB bagi UMKM, sebagaimana diungkapkan oleh Putri dan Santoso (2021), bahwa OSS berbasis risiko mampu memangkas birokrasi perizinan dan memberikan kepastian hukum yang lebih cepat. Namun, hambatan utama masih terletak pada rendahnya literasi digital, terutama di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, keberadaan modul prosedural dan pendampingan langsung menjadi faktor penting dalam mempercepat proses legalisasi usaha.



Gambar 1 Sosialisasi prosedural



Gambar 2 Hasil Pembuatan NIB

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari (2022) yang menyatakan bahwa pendampingan berbasis modul dapat meningkatkan keterlibatan pelaku UMKM dalam proses legalitas usaha. Modul yang disusun dengan bahasa sederhana dan langkah-langkah praktis membantu mengurangi hambatan administratif serta meningkatkan rasa percaya diri pelaku usaha dalam menggunakan platform digital. Selain itu, Handayani (2023) juga menegaskan bahwa modul prosedural tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga menumbuhkan budaya kepatuhan hukum di kalangan pelaku usaha kecil.

2. Penguatan Kapasitas Akuntansi Sederhana

Selain aspek legalitas, kegiatan ini juga fokus pada peningkatan kapasitas akuntansi dasar melalui pelatihan pencatatan keuangan sederhana. Peserta diajarkan cara mencatat pemasukan, pengeluaran, serta menyusun laporan laba rugi menggunakan buku kas sederhana. Beberapa peserta bahkan mulai memanfaatkan aplikasi kas digital setelah memahami manfaatnya dalam memonitor keuangan harian.



Gambar 3 Pendampingan akuntansi sederhana

Pendampingan akuntansi ini berdampak langsung terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas usaha, yang menjadi salah satu indikator utama kepercayaan konsumen. Penerapan sistem pencatatan sederhana membantu pelaku UMKM memahami posisi keuangan mereka secara lebih baik dan mengelola modal usaha secara efisien. Menurut Rahmawati (2024), praktik akuntansi sederhana dan kepemilikan NIB memiliki hubungan erat dengan peningkatan kredibilitas usaha di mata konsumen. Legalitas formal berfungsi sebagai jaminan tanggung jawab hukum, sementara laporan keuangan yang rapi menjadi bukti profesionalitas usaha. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam membangun *trust* (kepercayaan) pelanggan terhadap produk UMKM.

3. Dampak terhadap Kredibilitas dan Kepercayaan Konsumen

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan tidak hanya menghasilkan peningkatan jumlah UMKM yang memiliki NIB, tetapi juga memperkuat citra usaha di mata masyarakat. Pelaku UMKM menyatakan bahwa konsumen menjadi lebih yakin bertransaksi karena usaha mereka kini memiliki legalitas yang jelas dan pencatatan keuangan yang transparan.

Dampak ini sejalan dengan temuan Rahmawati (2024) bahwa kepemilikan NIB berkontribusi signifikan terhadap peningkatan loyalitas pelanggan dan citra usaha di pasar lokal. Legalitas usaha memberikan sinyal positif tentang kredibilitas, sementara penerapan akuntansi sederhana memperkuat citra profesionalitas pelaku UMKM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi pendampingan yang mengintegrasikan fasilitasi OSS dan pelatihan akuntansi sederhana tidak hanya berhasil meningkatkan efektivitas penerbitan NIB, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan berupa peningkatan kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap UMKM.

Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menegaskan bahwa pendampingan akuntansi dan legalitas usaha berperan penting dalam memperkuat kapasitas dan kepercayaan diri pelaku UMKM di Desa Pajajar Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka. Implementasi aplikasi OSS yang didukung modul prosedural terbukti mampu mempercepat proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha. Dari hasil evaluasi, terjadi peningkatan signifikan jumlah UMKM yang memiliki NIB, yaitu dari 15% menjadi 78% setelah dilakukan pendampingan. Selain itu, pelaku usaha menunjukkan peningkatan dalam kemampuan pencatatan keuangan dan kesadaran terhadap pentingnya akuntabilitas bisnis.

Kombinasi antara fasilitasi OSS dan pelatihan akuntansi sederhana terbukti efektif tidak hanya sebagai solusi administratif, tetapi juga sebagai strategi peningkatan kredibilitas dan kepercayaan konsumen. Dengan demikian, program ini dapat dijadikan model replikasi bagi desa-desa lain dalam mendukung transformasi UMKM menuju entitas usaha yang legal, profesional, dan berdaya saing di era digital.

Daftar Pustaka

- Handayani, R. (2023). Pendampingan Administratif dalam Proses Legalitas Usaha Mikro. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 55–67.
- Hapsari, R. (2024). Legalitas Usaha dan Pengaruhnya terhadap Kepercayaan Konsumen UMKM di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 9(2), 101–114.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Perkembangan UMKM 2023*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Putri, A., & Nurfadilah, L. (2023). Pendampingan Akuntansi dan Digitalisasi bagi UMKM Desa sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandiri*, 5(1), 55–63.
- Putri, A., & Santoso, D. (2021). Efektivitas Sistem OSS Berbasis Risiko terhadap Kemudahan Perizinan Usaha. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 14(1), 33–45.
- Rahmawati, N. (2024). Legalitas Usaha dan Pengaruhnya terhadap Kepercayaan Konsumen UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 9(1), 22–38.

- Sari, D. P., & Hidayat, R. (2022). Pengaruh Legalitas Usaha terhadap Kredibilitas dan Kepercayaan Konsumen UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Indonesia*, 12(3), 87–99.
- Sari, M., & Hidayat, R. (2022). Penerapan Modul Pendampingan OSS dalam Peningkatan Legalitas UMKM di Daerah Perdesaan. *Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 6(3), 75–88.
- Wibowo, T. (2023). Peran Legalitas dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Era Digital. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 25(1), 45–53.
- World Bank. (2022). *Microenterprise Formalization and Consumer Trust: Evidence from Southeast Asia*. Washington, DC: World Bank Publications.

